

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal Juli 2016, Korea Selatan dan Kementerian Pertahanan Amerika telah sepakat untuk menempatkan teknologi *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan. Hal ini didasari oleh krisis di semenanjung Korea yang semakin memanas dan adanya ancaman rudal oleh Korea Utara. THAAD merupakan alat milik angkatan udara Amerika yang dirancang untuk menangkis serangan rudal musuh (Meick & Salidjanova, 2017, p. 3). Selama tahun 2017, serangan rudal yang dilakukan Korea Utara mencapai sebanyak 23 rudal dalam 16 kali percobaan, beberapa diantaranya memiliki jarak yang lebih jauh, bahkan mencapai zona eksklusif Jepang (Berlinger, 2017). Penempatan alat ini diharapkan dapat menangkis serangan rudal yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh Korea Utara.

Kerjasama Korea Selatan dan Amerika dalam penempatan teknologi THAAD ini telah memicu reaksi dari Tiongkok. Tiongkok telah menemui duta besar Amerika dan Korea Selatan untuk mengajukan protes secara resmi dan menyampaikan ketidaksetujuannya (Meick & Salidjanova, 2017, p. 5). Selain itu, Tiongkok khawatir bahwa dengan adanya penempatan THAAD dapat mengancam situasi strategis Tiongkok karena sistem peringatan radar milik THAAD dapat mengurangi kemampuan sistem rudal milik Tiongkok untuk memantau serangan dari eksternal (Gurtov, 2017, p. 2). Hal ini membuat Tiongkok merasa harus melindungi kepentingan

militernya yang merupakan salah satu prioritas utama kepentingan nasional pemerintah Tiongkok dan juga keamanan negaranya.

Oleh karena itu Tiongkok mengeluarkan pernyataan ancaman bahwa ia akan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korea Selatan agar rencana penempatan THAAD tidak diteruskan. Tidak hanya itu, Tiongkok juga telah menjatuhkan sanksi pembalasan kepada Korea Selatan dengan berbagai cara, seperti memboikot produk dan perusahaan Korea Selatan di negaranya, melarang penampilan artis Korea, dan melarang agen travel membuka destinasi ke Korea Selatan semenjak adanya kesepakatan tersebut (Gurtov, 2017, p. 3). Hal ini tentunya menjadi pertimbangan bagi Korea Selatan, karena dapat membuat dampak yang serius bagi perekonomiannya.

Selama ini Tiongkok merupakan negara yang mempunyai andil besar dalam perekonomian Korea Selatan. Dalam sebuah data statistik perdagangan tahun 2016, diketahui bahwa Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor dan sumber impor terbesar bagi Korea Selatan dengan presentase ekspor sebesar 25,12%, sedangkan impor sebesar 21,41% (WITS, 2016). Selain itu, terdapat banyak perusahaan dari Korea Selatan yang beroperasi di Tiongkok, beberapa diantaranya adalah perusahaan Chaebol. Chaebol sendiri adalah kelompok konglomerat di Korea Selatan yang tercatat sebagai salah satu sejarah keberhasilan sistem konglomerasi dalam pembangunan ekonomi negara. Dalam bahasa Korea atau Hangul, Chaebol terdiri atas dua suku kata yaitu “*Chae*” yang berarti kekayaan dan “*bol*” yang berarti kelompok. Chaebol dapat juga merupakan perusahaan yang dijalankan dan dikendalikan oleh kepemilikan keluarga, baik dalam hal keuangan ataupun administratif. (Murillo Bonvehí & Yun-

dal, 2013, p. 3). Terdapat beberapa perusahaan besar milik Chaebol yang beroperasi di Tiongkok, antara lain seperti Lotte Group, Samsung Group, Kia Motor, LG Group, Hyundai Motor, SK Group, dan lainnya.

Keputusan Tiongkok untuk memboikot produk dan perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di negaranya telah menimbulkan efek samping bagi Chaebol dan juga ekonomi Korea Selatan. Dampak yang signifikan dirasakan oleh Lotte Group, karena diketahui telah menyepakati penukaran lahan golf miliknya yang berada di wilayah Seongju kepada pemerintah Korea Selatan untuk dijadikan lokasi penempatan THAAD. Hal ini mengakibatkan pemerintah Tiongkok merasa dicurangi oleh Lotte Group dan kemudian menerapkan boikot pada produk-produk Lotte Group, termasuk Lotte Mart dan Lotte Duty Free. Pada bulan Maret, pemerintah Tiongkok memerintahkan Lotte untuk menutup hampir 90% gerainya di Tiongkok, dan menyebabkan kerugian kurang lebih 300 miliar won (US \$ 263,97 juta) (Reuters, 2017).

Melihat kondisi seperti ini, pemerintah Korea Selatan mencoba untuk meyakinkan Tiongkok dan juga menjelaskan bahwa penempatan THAAD hanya berfungsi untuk mempertahankan kawasan dari ancaman rudal yang terus meningkat dari Korea Utara. Amerika yang merupakan negara pemilik teknologi THAAD juga turut serta dalam meyakinkan Tiongkok. Amerika telah mengundang Tiongkok untuk melakukan pembicaraan teknis, akan tetapi undangan tersebut di tolak (Panda, 2017). Usaha masih terus dilakukan oleh Korea Selatan, hingga pada akhir bulan Oktober

2017 terdengar kabar bahwa kedua negara telah memutuskan untuk kembali membangun hubungan kerjasamanya.

Mengenai kabar membaiknya hubungan antar kedua negara ini, pada pertengahan bulan November dalam sela-sela pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang dilaksanakan di Vietnam, Moon Jae In yang merupakan Presiden Korea Selatan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan secara resmi mengkonfirmasi kembalinya hubungan kerjasama antara Korea Selatan dengan Tiongkok (Asia Times, 2017). Adanya konfirmasi tersebut tentunya membuat keputusan sanksi Tiongkok terhadap Korea Selatan juga telah berangsur membaik, meskipun belum secara keseluruhan.

Hubungan bilateral antara Korea Selatan dengan Tiongkok merupakan hubungan yang cukup penting, karena selama ini Tiongkok merupakan pasar terbesar bagi Korea Selatan. Namun, hubungan antara Korea Selatan dan Chaebol tidak kalah penting karena selama ini keduanya telah banyak bekerjasama untuk menciptakan tingkat perekonomian yang tinggi Korea Selatan hingga seperti saat ini. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sanksi Tiongkok ini selain dibutuhkan adanya pendekatan dengan pemerintah Tiongkok juga dibutuhkan juga hubungan yang baik antara pemerintah Korea Selatan dengan Chaebol. Ketika pasar tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, maka pada saat itulah peranan negara dibutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan lebih fokus mengkaji mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca adanya penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017, dengan menggunakan studi kasus Lotte Group. Sehingga pertanyaan permasalahan yang akan penulis angkat adalah **bagaimana hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD 2016-2017 ?**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hubungan Pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca adanya sanksi dari Tiongkok.
2. Mengetahui kondisi dan respon Pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam menyikapi sanksi yang diberikan oleh Tiongkok.
3. Mengetahui penyelesaian masalah antara Korea Selatan dan Tiongkok

1.4 Signifikansi

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena dalam menjalankan perekonomian negaranya, Korea Selatan memiliki keunikan dimana bukan hanya pemerintah saja yang menjadi aktor utama, melainkan terdapat juga Chaebol yang merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara, dan tentunya juga memiliki peranan penting pada perkembangan ekonomi Korea Selatan. Hubungan harmonis antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol merupakan salah satu penyebab berhasilnya

pertumbuhan ekonomi negara ini. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol setelah adanya penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD. Penelitian ini akan dilihat melalui konsep *State-Business Relations*. Melalui konsep *State-Business Relations* ini peneliti akan melihat hubungan antara pemerintah dengan Chaebol pasca adanya penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD, serta melihat bagaimana respon keduanya.

Secara akademik, isu mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD 2016-2017 merupakan penelitian yang belum diteliti sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peranan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang tinggi dan stabil. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti, khususnya pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD yang memiliki pengaruh besar pada perdagangan Korea Selatan, karena Tiongkok yang merupakan pasar terbesar bagi ekspor Korea Selatan. Selain itu Korea Selatan juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Tiongkok, mengingat kedua negara ini memiliki letak geografis yang berdekatan, namun dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan, Tiongkok secara terang-terangan telah menolak dan membuat keputusan untuk menerapkan sanksi kepada Korea Selatan.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi Ekonomi Politik Korea Selatan yang berfokus pada hubungan antara pemerintah dengan bisnis swasta. Penulis melihat bahwa hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol sangatlah harmonis

dan bergantung antara satu sama lain. Kemudian dengan adanya ancaman rudal oleh Korea Utara membuat Korea Selatan memutuskan untuk memasang sistem THAAD milik Amerika. Namun ternyata hal ini mengundang penolakan dari Tiongkok, sehingga Tiongkok memutuskan untuk menerapkan sanksi ekonomi kepada Korea Selatan. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, membahas mengenai hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca adanya ancaman sanksi dari Tiongkok terkait penolakan penempatan THAAD. Penulis akan membatasi periode penelitian dari bermulanya kasus ini pada tahun 2016, sampai dengan dicabutnya sanksi Tiongkok untuk Korea Selatan yaitu pada tahun 2017.

1.6 Kajian Pustaka

Terdapat banyak artikel yang membahas mengenai hubungan antara negara dengan bisnis swasta. Termasuk hubungan antara negara dan bisnis di Korea Selatan. Dalam Jurnal Rhyu Sang Young yang berjudul *The Origins of Korean Chaebols and their Roots in the Korean War*, Young menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol di mulai pasca perang Korea. Pada saat itu kondisi Korea Selatan dalam keadaan memprihatinkan baik ekonomi maupun infrastruktur. Lebih buruknya, harga bahan produk dan bahan pokok meningkat cepat karena sulitnya transportasi dan logistik. Hal itu membuat pemerintah diharuskan untuk membuat kebijakan yang dapat menstabilkan ekonomi negara, yang kemudian dibuatlah kebijakan rekonstruksi ekonomi, dimana pemerintah Korea Selatan memberikan dana bantuan untuk mendorong dan memulihkan kelompok bisnis domestik mereka. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, Rhyu beranggapan bahwa cara yang dilakukan

pemerintah merupakan langkah awal dari hubungan pemerintah dengan bisnis swasta untuk meningkatkan ekonomi negara. Langkah ini merupakan sebuah keberhasilan, dibuktikan dengan perekonomian domestik yang semakin stabil, termasuk harga bahan-bahan pokok maupun produksi. Dalam jurnal ini, Young juga menekankan mengenai pentingnya peranan Syngman Rhee dalam awal pembentukan Chaebol, disebutkan bahwa munculnya Chaebol sangat bergantung pada partai Liberal milik Syngman Rhee (Young, 2005, pp. 203-17).

Berbeda dengan Young, menurut Wonhyuk Lim, dalam tulisannya yang berjudul *The origin and evolution of the Korean economic system*. Pembangunan pesat perekonomian Korea Selatan dimulai pada masa pemerintahan diktator Park Chung Hee pada tahun 1961. Pada saat itu Park mencoba untuk memulai menumbuhkan ekspor dengan cara memberikan subsidi pada setiap perusahaan yang mampu mengekspor produknya dan memberikan jaminan investasi bagi perusahaan dengan nilai ekspor yang tinggi. Kebijakan Park ini telah dianggap berhasil dalam mempercepat pembangunan industri Korea Selatan. Kelompok Chaebol sebagai perusahaan yang berhasil memiliki nilai ekspor tinggi telah mendapatkan jaminan dari pemerintah dan dianggap sebagai pahlawan bagi pembangunan ekonomi Korea Selatan pada saat itu (Lim, 2000).

Dalam buku Sea Jin Chang yang berjudul *Financial Crisis and Transformation of Korean Business Groups ; The Rise and Fall of Chaebols* dijelaskan mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol ketika terjadi krisis ekonomi Asia 1997. Dimana nilai tukar mata uang asing melonjak dari 864 won per dolar,

menjadi 1.690 won per dolar pada bulan Desember. Kejadian ini telah merugikan banyak pihak, mulai dari bangkrutnya sebagian perusahaan Chaebol dan banyaknya investor yang kemudian menarik dana investasi mereka. Hal ini menyebabkan dampak yang serius pada ekonomi Korea, hingga membuat IMF memutuskan untuk turun tangan. IMF berencana mengembalikan kepercayaan ekonomi Korea Selatan dengan mendorong pemerintah untuk mengatur kembali Chaebol. Pemerintah kemudian melakukan suntikan dana publik untuk menyelamatkan bank yang hampir bangkrut dan berusaha mengatur kembali Chaebol secara finansial dengan bantuan bank untuk mengurangi jumlah hutang akibat krisis Asia 1997 (Chang, 2003, pp. 3-9).

Dalam tulisan Joongi Kim yang berjudul *The Next Stage of Reforms: Korean Corporate Governance in the Post-Asian Financial Crisis Era* dijelaskan pemerintah tidak hanya membantu Chaebol dengan bantuan suntikan dana saja, melainkan juga melakukan serangkaian tindakan untuk menegur perusahaan agar mengurangi ketergantungan mereka pada hutang dan meningkatkan transparansi mengenai proses pengambilan keputusan pada perusahaan mereka. Setelah adanya bantuan dari pemerintah, perusahaan Korea dengan sigap merubah sistem mereka agar menjadi lebih baik. Beberapa hal yang dilakukan seperti, meningkatkan transparansi perusahaan dan mengatur kembali manajemen akuntansi mereka. Chaebol juga telah mencoba untuk mengurangi hutang berjangka. Chaebol meyakini bahwa dengan usaha mereka selama ini telah dapat mengatasi masalah tata kelola yang salah (Kim J. , 2006, pp. 4-12).

Meskipun begitu, pada tulisan Wonhyuk Lim dengan judul *The Emergence of the Chaebol and the Origins of the Chaebol Problem*, dikatakan bahwa semenjak terjadinya krisis pada 1997 telah banyak kritik keras mengenai model pembangunan ekonomi Korea, khususnya mengenai hubungan antara pemerintah dan bisnis swasta dan bank. Sistem pembangunan ini dianggap tidak efisien dan tidak efektif untuk sektor keuangan dan sektor korporasi. Selain itu, Chaebol dianggap sebagai salah satu sebab dari terjadinya krisis yang ada di Korea. Sebelumnya pada tahun 1980, permasalahan Chaebol pernah menjadi isu di pemerintahan. Intervensi yang dilakukan negara pada Chaebol dianggap terlalu berlebihan, hal ini dikhawatirkan dapat mendorong ekonomi di ambang pada krisis hutang, meningkatkan masalah ekuitas dan adanya potensi korupsi. Namun terdapat pula pembelaan, bahwa runtuhnya Chaebol dapat memperkeruh masalah keuangan, dan akan adanya usaha lebih dari pemerintah untuk membantu menstabilkan kembali perusahaan besar ini. Sehingga pemerintahan pada saat itu tetap mempertahankan eksistensi hubungannya dengan Chaebol (Lim, 2003, pp. 35-49).

Berbeda lagi dengan tanggapan Chung In Moon dan Rhyu Sang Young dalam buku Kim Young Ree yang berjudul *Redefining Korean Politics Lost Paradigm and New Fision*, keduanya berargumen bahwa penyebab krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan dapat dilihat dari 2 faktor, yakni faktor domestik dan internasional. Pada faktor domestik, dikarenakan adanya kegagalan kebijakan pemerintah akibat dari ketidakkonsistenan kebijakan makro ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan adanya kegagalan dalam mendisiplinkan sektor bisnis. Pada faktor internasional,

terdapat anggapan bahwa adanya krisis yang melanda Korea Selatan tidak terlepas dari efek domino yang terjadi di Thailand, yang kemudian menjalar ke negara-negara Asia lainnya (Moon & Rhyu, 2002, p. 106).

Kurang lebih, seperti itulah hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol selama ini. Hubungan antara pemerintah dengan bisnis swasta dalam sebuah negara sangatlah penting. Dalam studi kasus Korea Selatan, peran pemerintah sangatlah penting untuk Chaebol. Tanpa adanya peranan pemerintah, perusahaan Chaebol tidak dapat berkembang pesat seperti saat ini. Pemerintah adalah pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan kegagalan pasar yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Chaebol. Begitu juga dengan peranan Chaebol yang tidak kalah penting dalam membantu Korea Selatan untuk meningkatkan ekonomi negara.

Sebelum adanya penerapan sanksi Tiongkok kepada Korea Selatan atas penempatan THAAD, hubungan yang dijalin antara pemerintah Korea Selatan dengan pemerintah China juga merupakan hubungan yang cukup harmonis. Menurut Si Joong Kim dalam tulisannya *Economic and Trade Relations as an Arena of Korea-China Contention*, dikatakan bahwa hubungan bisnis antara Korea Selatan dan Tiongkok bermula pada tahun 1992. Dalam interaksi ekonomi bilateral antara Tiongkok dan Korea Selatan, perdagangan komoditas dan *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan komponen yang paling aktif. Hubungan ekonomi bilateral keduanya terus meningkat setiap tahunnya dan semakin ketergantungan antara satu sama lain (Kim S., 2012, pp. 237-262).

Dalam tulisan Jae Ho Chung yang berjudul *Korean Views of Korea-China Relations Evolving Perceptions and Upcoming Challenges* dijelaskan bahwa meskipun keduanya ketergantungan antara satu sama lain, namun ketergantungan perdagangan Korea Selatan kepada Tiongkok rupanya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi, dimana menurut data tahun 2010 mencapai 21% dibandingkan ketergantungan Tiongkok yang relatif stabil hanya 6,3% dikarenakan volume perdagangannya yang tumbuh lebih cepat. Hal ini membuat Tiongkok memiliki posisi yang lebih penting untuk perekonomian Korea Selatan (Chung J. , 2012, p. 219).

Dalam tulisan Kim Si-joong yang berjudul *Economic and Trade Relations as an Arena of Korea-China Contention*, Kim menjelaskan bahwa pada dasarnya Tiongkok dengan Korea Selatan telah mempertahankan hubungan ekonomi yang baik selama dua puluh tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan ekspansi yang luar biasa dari adanya perdagangan dan arus investasi antara keduanya. Namun, beberapa perselisihan dalam ekonomi dan perdagangan mulai terjadi diantara keduanya. Kim memperediksi bahwa perselisihan mengenai keamanan, perdagangan, investasi, teknologi, dan perjanjian bikateral antara keduanya dapat diidentifikasi sebagai potensi adanya konflik antara Tiongkok dan Korea Selatan di masa depan (Kim S. , 2012)

1.7 Landasan Konseptual

Untuk mendukung argumen di dalam makalah ini, penulis menggunakan konsep *State-Business Relations* (SBR) melihat dari buku Alberto Lemma dan Diek Willem te Velde yang berjudul *State-Business Relations as Drivers of Economic Performance* (Lemma & te Velde, 2015). Konsep ini menjelaskan mengenai hubungan

antara negara (publik) dan bisnis (swasta). Hubungan keduanya dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, mulai dari hubungan formal, hubungan informal, dan koordinasi dalam membuat kebijakan. SBR dapat mencakup ekonomi secara keseluruhan ataupun dengan target sektor tertentu. Lemma dan te Velde dalam buku ini menuliskan bahwa efektif atau tidaknya SBR dapat dilihat apakah negara dan bisnis dapat berkolaborasi dan bersinergis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diinginkan atau justru sebaliknya.

Berdasarkan kontribusi Evans (1995), Maxfield dan Schneider (1997) dalam buku Lemma dan te Velde, untuk membuat pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih efektif, *State-Business Relations* diketahui memiliki beberapa karakteristik yaitu: (a) adanya transparansi dalam bertukar informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga pemerintah dalam menetapkan kebijakan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sektor swasta; (b) hubungan timbal balik, dalam memberikan subsidi kepada sektor bisnis, pemerintah harus mengetahui bahwa subsidi yang diberikan akan digunakan secara produktif; (c) menjaga kredibilitas negara di antara pebisnis, kredibilitas negara dalam menjaga komitmennya, bagaimanapun situasinya negara tetap memegang komitmennya terhadap kebijakannya sehingga dapat meningkatkan kredibilitas negara; (d) membangun tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemerintah dan swasta (Lemma & te Velde, 2015, p. 3).

Menurut Lemma dan te Velde, adanya hubungan antara negara dan bisnis mampu membantu mengarahkan perekonomian dalam mengatasi 2 kekhawatiran: Pertama, adanya *market failure*, dimana pasar tidak dapat menjalankan perannya secara

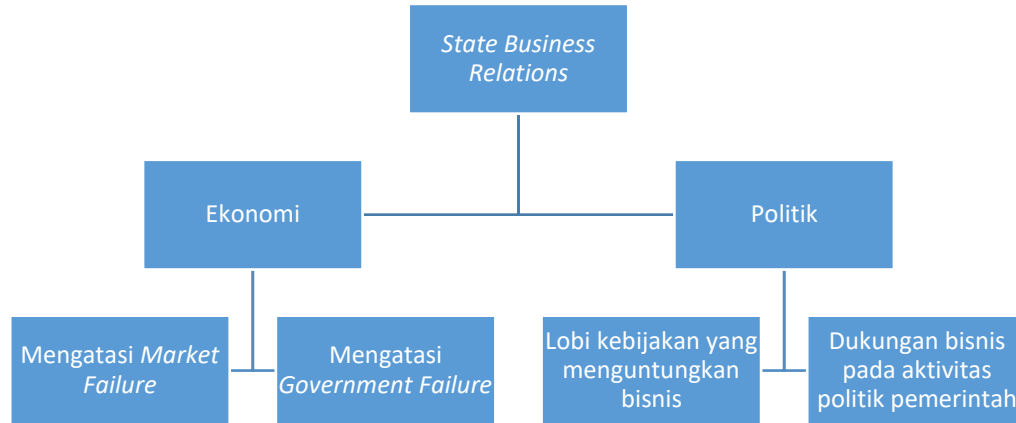
optimal dikarenakan tidak mempunyai kemampuan penuh untuk mendapatkan sumber daya. Kasus kegagalan pasar dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan atau perubahan iklim. Kedua, adanya *government failures*, dimana pendekatan ini menyatakan bahwa pemerintah sendirian saja tidak dapat menyelesaikan *market failure*. Hal ini terjadi ketika pemerintah tidak memiliki informasi yang cukup dan masih terkendala dengan politik yang tidak pasti. Maka dengan adanya SBR akan mencoba menyelesaikan masalah yang ada di pasar dan pemerintahan dengan koordinasi yang baik, sehingga dapat menghasilkan tingkat investasi yang baik dalam sistem pasar dan mengurangi adanya ketidak pastian kebijakan. Untuk mengatasi dua kekhawatiran tersebut, diperlukan adanya hubungan yang harmonis antara keduanya. Dalam posisi ini, negara tidak serta merta mengintervensi secara mutlak pada sektor swasta, namun lebih kepada memposisikan dirinya sebagai pengawal yang menyimak dan mendampingi jalannya perekonomian dengan tetap memberikan ruang gerak yang besar bagi jalannya mekanisme pasar (Lemma & te Velde, 2015, pp. 4-5).

Menurut Stefan Schepers, dalam tulisannya yang berjudul *Business-Government Relations: Beyond Lobbying*, pemerintah menerapkan konsep *State-Business Relations* tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi negara saja. Pemerintah memiliki tiga peranan utama, yaitu sebagai penentu hukum dan tata aturan, peredistribusi kesejahteraan dan menetapkan standar minimum kehidupan, dan organisasi yang mengatur ekonomi pasar. Membahas mengenai ekonomi pasar, ketika pasar mengalami penurunan yang berlanjut, tentunya hal ini akan menyebabkan kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakatnya. Apabila hal ini terjadi, maka

dapat mempengaruhi fungsi dari pemerintah dan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, karena kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah (Schepers, 2010, pp. 7-8).

Pada hubungan antara negara dan bisnis terdapat istilah *lobbying* atau melobi. Aktivitas melobi ini dilakukan pada setiap pemerintahan, baik otoriter ataupun demokratis, dan oleh beberapa aktor. Pada pemerintahan, aktivitas ini sering disebut dengan diplomasi. Aktivitas ini dijalankan dengan metode yang beragam dengan tujuan mencapai lingkungan yang menguntungkan dan apa yang menjadi kepentingannya dapat terpenuhi. Pada perusahaan, melobi dilakukan untuk mempengaruhi otoritas pemerintah dalam mempertimbangkan pandangan dan kepentingan pribadi pada saat memutuskan kepentingan publik dan membuat peraturan tentangnya. Sama halnya dengan pemerintah, aktivitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang menguntungkan bagi pihak bisnis dan merupakan bagian dari strategi perusahaan bisnis untuk kepentingan komersial. Bahkan, bisnis juga menggunakan kontribusi publik untuk mendukung posisi mereka dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat membantu mereka meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam perspektif bisnis, pemerintah harus mendukung dan mendorong kinerja dan investasi bisnis, karena bisnis adalah sumber utama pekerjaan, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi sosial. Oleh karena itu bisnis

membutuhkan dukungan dari pemerintah yang dapat berupa hibah, kredit pajak, atau subsidi (Schepers, 2010, pp. 6-7).



Sumber: penulis

Selain menggunakan konsep *State-Business Relations*, dalam skripsi ini penulis juga akan menggunakan konsep *Issue Linkage* untuk menyelesaikan permasalahan sanksi yang diterapkan oleh Tiongkok. Menurut definisi Ernest B. Haas, *Issue Linkage* yaitu penawaran atau perjanjian tukar menukar oleh dua aktor (negara) yang melibatkan lebih dari satu isu (Haas, 1990, p. 76). Untuk mencapai sebuah kesepakatan, Haas mempertimbangkan 2 tipe *Issue Linkage* yaitu taktis dan substantive; 1) Taktis terjadi ketika isu-isu yang terkait tidak secara koheren terhubung antara satu sama lain; berbeda dengan taktis 2) Substantive, terjadi ketika isu-isu yang terkait masih berkesinambungan antara satu sama lain (Haas, 1980, pp. 371-374).

Untuk menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan konsep ini, maka perlu menentukan aktor-aktor siapa saja yang menjadi *linker* dan *linkee*. *Linker* adalah pihak yang memberikan tawaran barter suatu isu dengan isu lainnya dan *linkee* adalah pihak yang menerima tawaran tersebut memiliki peran untuk menerima tawaran atau

tidak (Mugasejati & Rais, 2011, p. 22). Dalam penelitian ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam pertukaran issue atau barter isu. Pihak pertama atau linker adalah Tiongkok, sementara pihak kedua atau linkee adalah Korea Selatan. Tiongkok berperan sebagai pihak pertama yang menghubungkan dengan isu lain, oleh karenanya peran Tiongkok disebut linker. Sementara Korea Selatan sebagai pihak yang menerima tawaran maka disebut sebagai linkee. Adapun penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam bab selanjutnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk membantu peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah pada suatu gejala, fakta, dan realita yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada. Metode kualitatif akan menggunakan data yang di ambil melalui wawancara, observasi lapangan, atau dokumen yang ada. Dalam penelitian, metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dari apa yang dapat diamati (Dr. J.R. Raco, 2010). Seperti juga yang dipaparkan oleh Creswell bahwa metode kualitatif adalah sebuah proses dalam penyelidikan suatu fenomena sosial untuk dapat lebih dipahami dan diterapkan dalam suatu metodologi serta melakukan eksplorasi (Creswell, 2009, p. 32).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena metode ini meneliti sebuah kasus secara mendalam, dan lebih spesifik. Selain itu, metode kualitatif

memandang ilmu sosial sebagai sebuah disiplin yang tersendiri dan berbeda, karena melibatkan objek subjektif, dan sangat efektif untuk digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan yang ada (Marsh & Stocker, 2010, p. 282). Metode penelitian ini juga berfokus pada pemahaman dan makna dan sering didefinisikan sebagai metode yang sistematis dan intuitif untuk menghasilkan penelitian yang koheren dan efisien (Bakry, 2016, hal. 62).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah aktor yang terkena dampak dari sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD yakni pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Selain menjadi aktor utama, hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol juga menjadi hal yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Mengenai sumber data yang akan ditelusuri, dalam teknik ini akan digunakan metode pengambilan data primer dan sekunder (Sekaran, 2006). Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer yang akan digunakan adalah data yang berasal dari laman resmi pemerintahan dan juga institusi lain seperti kementerian-kementerian di masing-masing negara terkait penelitian ini.

Berbeda dengan data primer, data sekunder sendiri adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelusuran dalam tulisan-tulisan ilmiah atau artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik.

1.8.4 Proses Penelitian

Menurut Prof. Dr. Suryana, proses penelitian terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan mengidentifikasi masalah atau mencari pokok permasalahan yang paling relevan dan menarik untuk diteliti, merumuskan masalah dengan memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut, menyusun kerangka pemikiran, mencari kajian pustaka, yang dilanjutkan dengan mencatat hasil kajian dan hasil bacaan agar gagasan yang muncul dapat disimpan, dan menganalisis data (Suryana, 2010).

Tahap selanjutnya adalah konseptualisasi permasalahan yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian, dilanjutkan dengan menentukan landasan konseptual yang akan mendukung dan memperkuat hasil dari penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data dan mengolah data yang didapatkan. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisa terkait dengan permasalahan yang didapatkan hingga memperoleh hasil dalam penelitian kemudian setelah itu melakukan interpretasi atau melaporkan hasil dari penelitian tersebut dan terakhir adalah melaporkan hasil dari penelitian (Gulo, 2002).